

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, namun implementasi kebijakan tersebut masih perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan dari keempat kriteria George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, kriteria sumber daya masih perlu diperbaiki.

Tidak terpenuhinya kriteria sumber daya tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhinya sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya alat berat dan fasilitas penunjang. Dari segi sumber daya manusia yang ada, meskipun jumlahnya mencukupi dengan jumlah 2.005 staf, mayoritas memiliki pendidikan SLTA ke bawah (1.789 staf). Di TPA Sumur Batu, dari 75 staf, hanya 4 yang berpendidikan S-1, hal ini menunjukkan kekurangan dalam hal pendidikan. Secara finansial, Dinas LH Kota Bekasi juga mengalami kekurangan anggaran. Sebagian besar anggaran terpusat pada penanganan dan pengangkutan sampah dengan biaya mencapai Rp118,437,596,133. Akibatnya, terdapat kesulitan dalam peremajaan truk sampah dan peningkatan kapasitas penampungan di TPA Sumur Batu.

Selain itu, Dinas LH Kota Bekasi belum berhasil menyediakan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Sistem PLTSa ini menjadi penting dikarenakan PLTSa dapat sangat membantu

penguraian tumpukan sampah yang ada dibandingkan dengan sistem *Open Dumping*. Lebih daripada itu, PLTSa juga dapat menghasilkan 1,5 megawat listrik dari 79,2 ton sampah yang diurai. Sehingga PLTSa bukan hanya membantu penguraian sampah saja, tetapi juga membantu menghasilkan energi listrik terbarukan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, melalui proses wawancara mendalam dan studi kepustakaan, peneliti dapat memberikan saran terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Mengkaji ulang anggaran pengelolaan sampah yang ada pada Renstra dan Renja Dinas LH Kota Bekasi, agar anggaran tidak terpusat pada proses penanganan dan pengangkutan sampah, sehingga Dinas LH Kota Bekasi dapat menggunakan anggaran untuk melakukan peremajaan truk sampah dan peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu.
2. Memasifkan kembali program TPS 3R dan Bank Sampah agar pemerintah Kota Bekasi dapat mengurangi penumpukan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi.
3. Merealisasikan program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi, agar pengelolaan dan penguraian sampah dapat terlaksana, sehingga penumpukan sampah di TPA Sumur Batu dapat berkurang.